



Lawfare dan Disinformasi: Analisis Etis atas Strategi Rusia dalam Perang Ukraina 2022

Apria Mamudza Permana

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: apriamzp91@gmail.com

Abstract

The 2022 Russian invasion of Ukraine signifies a pivotal evolution in hybrid warfare, wherein information and legal instruments are instrumentalized as strategic weapons (lawfare) to manipulate global perception and monopolize domestic truth. Drawing upon moral responsibility theory and information ethics, this study aims to identify the primary mechanisms of Russia's employment of lawfare, evaluate the ethical implications of the resulting informational degradation, and assess Ukraine's information defense response in cultivating national epistemic resilience. Employing a qualitative approach via a systematic literature review of legal documents, investigative reports, and expert analyses, this research reveals that Russian lawfare operates as an integrated system amalgamating legal instruments, digital propaganda, and repression against journalists. Furthermore, the findings indicate that Ukraine has successfully mitigated certain impacts through narrative consolidation and OSINT verification, yet faces ethical dilemmas regarding the equilibrium between information security and democratic values. Conclusively, this study underscores that modern lawfare necessitates a novel ethical approach that prioritizes the protection of the information space as a fundamental pillar of sovereignty and national security.

Keywords: *Lawfare, Disinformation, Information Ethics, and the Ukraine War.*

Abstrak

Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 menandai evolusi krusial dalam peperangan hibrida, di mana informasi dan instrumen hukum dimanfaatkan sebagai senjata strategis (*lawfare*) untuk memanipulasi persepsi global dan memonopoli kebenaran domestik. Dengan menggunakan teori tanggung jawab moral dan etika informasi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme utama penggunaan *lawfare* oleh Rusia, mengevaluasi dampak etis dari kerusakan informasi yang ditimbulkan, serta menilai respons

pertahanan informasi Ukraina dalam membangun ketahanan epistemik nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis terhadap dokumen hukum, laporan investigatif, dan analisis pakar, penelitian ini menemukan bahwa *lawfare* Rusia beroperasi sebagai sistem terpadu yang menggabungkan instrumen legal, propaganda digital, dan represi terhadap jurnalis. Selanjutnya, temuan juga menunjukkan bahwa Ukraina mampu meredam sebagian dampak melalui konsolidasi narasi dan verifikasi OSINT, namun menghadapi dilema etis terkait keseimbangan antara keamanan informasi dan nilai-nilai demokrasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *lawfare* modern menuntut pendekatan etis baru yang memprioritaskan perlindungan ruang informasi sebagai fondasi kedaulatan dan keamanan nasional.

Kata Kunci : Lawfare, Disinformasi, Etika Informasi, dan Perang Ukraina.

1. PENDAHULUAN

Peperangan kontemporer telah mengalami pergeseran fundamental dari dominasi kekuatan kinetik menuju konfigurasi konflik hibrida yang memadukan operasi militer, hukum, diplomasi, dan informasi sebagai satu kesatuan strategis yang tidak terpisahkan. Dalam lanskap yang semakin kompleks ini, pertempuran tidak lagi terbatas pada medan fisik, melainkan meluas pada ruang digital, penggunaan regulasi hukum, dan persepsi publik. Informasi telah bertransformasi menjadi instrumen strategis berbiaya rendah namun berdampak tinggi karena mampu melemahkan kohesi sosial, mendegradasi legitimasi pemerintahan, serta menciptakan tekanan psikologis tanpa perlu melibatkan mobilisasi militer berskala besar secara langsung (Giles, 2023). Fenomena ini menandai kebangkitan *lawfare* atau pemanfaatan hukum, informasi, dan institusi normatif sebagai alat agresi non-kinetik yang telah menjadi karakteristik utama strategi geopolitik Rusia dalam satu dekade terakhir. Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, disinformasi telah berevolusi menjadi senjata geopolitik yang setara dengan penggunaan kekuatan militer konvensional dan digunakan untuk menyelubungi agresi dalam kabut ketidakpastian.

Operasi informasi Rusia tidak berjalan secara fragmentaris, melainkan sebagai

kampanye terintegrasi yang melampaui batas domain tradisional perang guna mencapai tujuan politik luar negeri (NATO StratCom, 2015). Dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina, *lawfare* muncul sebagai kerangka analisis yang paling relevan untuk membedah dinamika agresi yang dilakukan melalui kontrol informasi, manipulasi narasi, dan instrumentalisasi kerangka hukum domestik maupun internasional. Rusia mengoperasikan manipulasi digital secara sistematis, mulai dari *astroturfing* dan operasi *bot* hingga produksi narasi *pseudo-legal* yang bertujuan memanipulasi persepsi ancaman global (NATO StratCom, 2022). Teknik fabrikasi realitas (*fabricating reality*) dan rekayasa informasi digunakan secara masif untuk menciptakan pembenaran artifisial bagi aksi militer tersebut (Johansson & Simanschi, 2023).

Praktik *lawfare* ini membawa implikasi etis yang signifikan karena secara langsung menyerang otonomi kognitif dan hak masyarakat atas kebenaran. Dari perspektif etika informasi (*Information Ethics*) dan teori tanggung jawab moral (*Moral Responsibility Theory*), tindakan Rusia merepresentasikan kerusakan epistemik terstruktur yang merusak integritas lingkungan informasi atau *infosphere* (Floridi, 2013). Kriminalisasi kebenaran melalui undang-undang "berita palsu" Rusia memperkuat kerusakan ini dengan mengubah verifikasi independen menjadi tindakan ilegal sehingga mengaburkan sumber kebenaran yang kredibel (Thomson Reuters Foundation & CPJ, 2022).

Tanggung jawab atas kerusakan epistemik ini tidak hanya terletak pada negara sebagai entitas abstrak, tetapi melibatkan ekosistem aktor yang kompleks dengan tingkat kesalahan (*culpability*) yang berbeda. Laporan menunjukkan adanya sinergi erat antara pejabat negara, tokoh media pro-rezim seperti Vladimir Solovyov dan Margarita Simonyan, serta jaringan *milbloggers* (*blogger* militer) di Telegram yang beroperasi dengan tingkat independensi semu namun tetap berada dalam koridor narasi Kremlin (NATO StratCom, 2024). Aktor-aktor ini memainkan peran kunci dalam memobilisasi emosi

publik, seperti kebanggaan, kemarahan, dan ketakutan, untuk mengamankan dukungan terhadap perang (Johansson & Simanschi, 2023). Dalam kerangka *Moral Responsibility Theory*, perlu dipetakan siapa yang bertindak sebagai arsitek kebohongan dan siapa pelaksana sukarela yang memiliki pengetahuan penuh atas tindakan manipulatif mereka.

Meskipun studi mengenai disinformasi Rusia telah banyak dilakukan, literatur yang ada cenderung berfokus pada pola operasional teknis atau analisis strategi militer semata tanpa kerangka moral yang terstruktur. Masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam menganalisis bagaimana instrumen hukum (*lawfare*) digunakan secara spesifik untuk menciptakan kerusakan epistemik dan moral yang melampaui analisis dampak fisik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan teori *lawfare* dan etika informasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konseptual: *Lawfare* dan *Pseudo-Legality*

Untuk menghindari ambiguitas konseptual, penelitian ini membedakan secara tegas antara terminologi kunci yang digunakan. *Lawfare* didefinisikan sebagai penggunaan hukum, regulasi, dan instrumen normatif secara strategis untuk memperoleh keuntungan politik atau militer dalam suatu konflik (Kittrie, 2016). Dalam doktrin Rusia, ini beroperasi sebagai komponen integral dari konflik spektrum penuh. Sementara itu, *pseudo-legality* atau legalitas semu merujuk pada klaim hukum yang dibangun di atas bukti yang difabrikasi atau interpretasi hukum yang dipaksakan untuk memberikan persetujuan legitimasi pada tindakan ilegal, seperti aneksasi wilayah (Johansson & Simanschi, 2023). Disamping itu, Espaliú-Berdud (2023) juga menegaskan bahwa kampanye disinformasi yang disponsori negara kini telah memenuhi elemen atribusi

untuk dikategorikan sebagai ancaman keamanan yang melanggar prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara lain.

2.2 Etika Informasi dan Kerusakan Epistemik

Dalam kerangka etika informasi (*Information Ethics*), agresi terhadap ekosistem informasi dipahami sebagai bentuk kerugian moral (*moral harm*) karena mencederai otonomi epistemik individu. Disinformasi sistematis yang dijalankan Rusia menciptakan kerusakan epistemik melalui produksi realitas palsu dan penutupan akses terhadap fakta objektif (Floridi, 2013). NATO StratCom (2022) mengidentifikasi bahwa taktik seperti kelebihan beban kognitif (*cognitive overload*) dan pengurungan epistemik (*epistemic enclosure*) digunakan untuk membanjiri ruang publik dengan informasi yang saling bertentangan sehingga melumpuhkan kemampuan masyarakat untuk membedakan kebenaran dari kebohongan.

2.3 Teori Tanggung Jawab Moral dan Legal

Teori tanggung jawab moral (*Moral Responsibility Theory*) menyediakan kerangka untuk menentukan akuntabilitas aktor di balik kerusakan epistemik. Berdasarkan prinsip kontribusi kausal, pengetahuan, dan kesukarelaan, aktor-aktor seperti pembuat undang-undang represif, operator *bot*, dan propagandis media memikul tanggung jawab moral atas manipulasi publik yang terjadi (Robin, 2024). Di sisi lain, dalam ranah hukum internasional, negara memikul tanggung jawab (*state responsibility*) ketika disinformasi digunakan sebagai senjata untuk melanggar kedaulatan atau hak asasi manusia, yang membenarkan tindakan balasan atau sanksi dari komunitas internasional (Bjola, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis dan analisis dokumen untuk membedah penerapan *lawfare* Rusia pada saat pemberlakuan perang terhadap Ukraina. Pendekatan ini dipilih karena kompleksitas

fenomena disinformasi dan aspek normatif hukum yang tidak dapat diukur semata-mata dengan variabel kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis pada database akademik, repositori laporan *think-tank* (NATO StratCom, CEPA, RSF), serta arsip investigasi digital.

Kriteria inklusi mencakup dokumen hukum primer Rusia, laporan investigatif yang diterbitkan pasca-invasi 2022, serta literatur etika informasi yang relevan. Data dikumpulkan dari dokumen hukum primer Rusia yaitu Undang-Undang Federal No. 32-FZ (2022), laporan investigasi dari lembaga internasional seperti NATO StratCom dan CEPA, serta data statistik kebebasan pers dari RSF.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rusia dan Penggunaan *Lawfare* sebagai Instrumen Agresi Sistemik

Rusia telah mengembangkan strategi perang hibrida di mana hukum dan informasi tidak lagi sekadar instrumen pendukung, melainkan senjata utama. Analisis terhadap dokumen kebijakan dan praktik lapangan menunjukkan bahwa *lawfare* Rusia beroperasi melalui tiga mekanisme utama yang saling berkelindan, yakni kriminalisasi domestik, fabrikasi narasi legal internasional, dan manipulasi teknis digital.

4.1.1 Instrumentasi Hukum dan Kriminalisasi Kebenaran

Fondasi utama dari *lawfare* domestik Rusia adalah pengesahan Undang-Undang Federal No. 32-FZ pada 4 Maret 2022 yang menambahkan Pasal 207.3 ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federasi Rusia. Pasal ini secara eksplisit melarang "penyebaran publik atas informasi yang diketahui salah (*knowingly false information*) mengenai penggunaan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia". Dalam praktiknya, frasa "diketahui salah" ditafsirkan secara tunggal sebagai segala informasi yang bertentangan dengan rilis resmi dari Kementerian Pertahanan. Sehingga, pelanggaran terhadap pasal ini dapat diancam dengan hukuman penjara hingga 3 tahun, atau hingga 15 tahun jika

tindakan tersebut dianggap menimbulkan konsekuensi berat (Federal Law No. 32-FZ, 2022).

Langkah legislasi ini bukan sekadar sensor domestik, melainkan bagian dari pola internasional disinformasi yang secara hukum dikategorikan sebagai tindakan salah atau *wrongful act*. Sebagaimana dicatat oleh Espaliú-Berdud (2023), undang-undang "berita palsu" Rusia sejalan dengan upaya sistematis untuk memanipulasi ruang informasi yang oleh Uni Eropa telah dinyatakan sebagai bentuk "campur tangan dalam proses demokratis" (*interference in democratic processes*). Dengan demikian, negara menciptakan monopoli epistemik di mana fakta diverifikasi bukan melalui bukti, melainkan melalui dekrit negara.

4.1.2 Ekosistem Manipulasi Terintegrasi dan Fabrikasi Legalitas

Keunikan strategi Rusia terletak pada integrasi total antara berbagai kanal media untuk membangun narasi *pseudo-legal*. Laporan NATO StratCom (2024) menunjukkan adanya sinergi yang erat antara situs web resmi pemerintah, siaran televisi negara, dan jaringan saluran Telegram. Sementara televisi negara menyajikan narasi yang dipoles untuk konsumsi domestik massal, Telegram digunakan sebagai ruang yang lebih fleksibel untuk menyebarkan konten yang lebih agresif dan *real-time* melalui para *milbloggers*.

Ekosistem tersebut memungkinkan Rusia untuk melakukan pencucian narasi (*information laundering*), yakni disinformasi yang diproduksi oleh saluran anonim di Telegram kemudian diamplifikasi oleh media resmi seolah-olah sebagai fakta yang terverifikasi (NATO StratCom, 2022). Secara khusus, Rusia juga menciptakan narasi *pseudo-legal* seperti klaim perlindungan terhadap etnis Rusia dari "genosida" dan upaya "denazifikasi". Menurut Espaliú-Berdud (2023), disinformasi pembentuk legitimasi palsu (*pseudo-legality*) ini merupakan instrumen agresi yang melanggar hukum internasional, bukan sekadar propaganda domestik. Narasi tersebut dirancang untuk mengeksploitasi

kerentanan sosial dan menciptakan pembenaran artifisial bagi pelanggaran kedaulatan wilayah, yang pada hakikatnya merupakan bentuk intervensi ilegal terhadap urusan domestik negara lain (Fisher, 2022).

4.1.3 Manipulasi Digital dan Pengelakan Sanksi

Pada ranah digital, Rusia juga menunjukkan adaptabilitas tinggi dalam menghadapi sanksi platform global. Ketika akses ke Facebook dan Twitter dibatasi, aparat propaganda negara seperti Margarita Simonyan dan jaringan RT beralih menggunakan Telegram sebagai pusat distribusi utama untuk kemudian melakukan *cross-posting* otomatis ke *platform* Barat guna menghindari deteksi moderasi konten (NATO StratCom, 2022). Laporan tersebut mencatat bahwa meskipun jangkauan media negara Rusia menurun di *platform* negara-negara barat, jangkauan mereka di *platform* domestik seperti *VKontakte* justru meningkat drastis sehingga menciptakan ruang gema yang semakin tertutup dan radikal. Strategi ini menegaskan bahwa *lawfare* Rusia juga mencakup aspek teknis untuk mempertahankan kedaulatan informasi secara paksa.

4.2 Dampak Etis: Kerusakan Epistemik dan Tanggung Jawab Moral

Strategi *lawfare* Rusia menghasilkan dampak yang melampaui kerugian politik atau militer karena strategi ini menciptakan kerusakan fundamental pada tatanan moral dan epistemik masyarakat. Disinformasi Rusia tidak hanya merusak integritas epistemik, tetapi juga melanggar hak asasi warga untuk mendapatkan informasi yang benar, sebagaimana diperingatkan dalam resolusi Dewan HAM PBB tahun 2022 (Espaliú-Berdud, 2023).

4.2.1 Pelanggaran Etika Informasi dan Otonomi Kognitif

Ditinjau dari perspektif etika informasi, tindakan Rusia merupakan pelanggaran berat terhadap otonomi kognitif warga. Dengan membanjiri ruang informasi dengan narasi palsu, seperti klaim biolab AS atau penyangkalan pembantaian Bucha, dan secara

simultan menutup akses ke sumber independen, Rusia melakukan apa yang disebut Floridi sebagai kekerasan epistemik (*epistemic violence*). Berdasarkan inferensi dari literatur strategis, operasi disinformasi ini dapat diargumentasikan berfungsi layaknya senjata pemusnah massal non-kinetik atau (*WMD of cognition*), di mana tujuan strategisnya bukan sekadar meyakinkan publik akan satu narasi, melainkan menghancurkan kapasitas masyarakat untuk mempercayai sumber informasi apa pun (Giles, 2023). Masyarakat tidak hanya ditipu, tetapi kemampuan mereka untuk memproses realitas secara rasional dirusak secara sistematis.

4.2.2 Penargetan Jurnalis sebagai Infrastruktur Kebenaran

Aspek paling brutal dari lawfare ini adalah serangan fisik dan legal terhadap jurnalis. Jurnalis bukan sekadar individu, melainkan infrastruktur vital bagi kebenaran publik atau simpul verifikasi (*nodes of verification*). Serangan terhadap mereka berarti memotong mekanisme pemulihan epistemik (*epistemic recovery mechanisms*) masyarakat (Fisher, 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat perbedaan angka dalam laporan mengenai jumlah jurnalis yang menjadi korban, yang merefleksikan perbedaan metodologi pendataan.

Menurut Center for European Policy Analysis (CEPA, 2023), tercatat lebih dari 30 jurnalis yang secara spesifik ditahan, disiksa, atau dihilangkan paksa di wilayah pendudukan. Sementara itu, Reporters Without Borders (RSF, 2025) melaporkan angka yang lebih besar, yakni hampir 150 jurnalis yang menjadi korban, karena mencakup spektrum serangan yang lebih luas termasuk serangan fisik di garis depan, penahanan, dan ancaman langsung. Perbedaan data ini menegaskan bahwa skala serangan terhadap pilar epistemik ini sangat masif dan sistematis, melanggar prinsip pembedaan (*distinction*) dalam etika perang.

4.2.3 Akuntabilitas Moral dan Legal Aktor

Berdasarkan teori tanggung jawab moral, kesalahan tidak hanya terletak pada

pucuk pimpinan negara. Aktor-aktor dalam rantai disinformasi, mulai dari pembuat undang-undang yang merancang pasal represif, propagandis media yang secara sadar menyebarkan kebohongan, hingga operator bot, memiliki tingkat kesalahan (*culpability*) karena memenuhi unsur kontribusi kausal dan pengetahuan (*knowledge*) atas dampak tindakan mereka.

Dalam diskursus etika, meskipun bukan merupakan konsensus hukum positif, terdapat argumen bahwa operator bot dan propagandis yang aktif memfasilitasi operasi militer bertindak sebagai kombatan di ranah kognitif (*combatants in the cognitive domain*). Oleh karena itu, tanggung jawab moral atas tindakan mereka menjadi sangat signifikan, melampaui sekadar penyebar informasi pasif (Robin, 2024). Selain beban moral individu, Espaliú-Berdud (2023) berargumen bahwa kampanye disinformasi yang disponsori negara telah memenuhi syarat atribusi untuk dianggap sebagai tindakan salah secara internasional (*internationally wrongful acts*). Hal ini menegaskan bahwa aktor negara tidak hanya memikul beban moral atas kerusakan epistemik, tetapi juga liabilitas hukum yang membenarkan penerapan sanksi internasional.

Mekanisme <i>Lawfare</i> Rusia	Deskripsi Strategis	Dampak Epistemik	Pelanggaran Tanggung Jawab Moral
Kriminalisasi Informasi (Pasal 207.3 KUHP)	Menganggap semua info non-resmi sebagai “palsu”	<i>Epistemic closure</i> ; hilangnya akses publik ke fakta	Pelanggaran <i>epistemic justice</i> ; penyalahgunaan kekuasaan
<i>Pseudo-Legality</i> (<i>Denazifikasi, Genocide Claims</i>)	Menggunakan bahasa hukum internasional secara menyesatkan	Distorsi kerangka moral global	Manipulative framing; moral deception

Mekanisme <i>Lawfare</i> Rusia	Deskripsi Strategis	Dampak Epistemik	Pelanggaran Tanggung Jawab Moral
Propaganda Terpadu TV– <i>Telegram–Web</i>	Ekosistem disinformasi dengan saling amplifikasi	Epistemic confusion; overload	Pelanggaran <i>integrity of infosphere</i>
<i>Bot & Proxy Amplification</i>	Ribuan akun memperkuat narasi Kremlin	False consensus; manipulasi persepsi publik	Tanggung jawab moral individu & negara
Penargetan Journalists	Penahanan, penyiksaan, penghilangan	Pemutusan jaringan verifikasi kebenaran	<i>Epistemic violence; violation of truth infrastructure</i>
<i>Censorship & Media Shutdown</i>	Penutupan TV, radio, dan media independen	Monopoli kebenaran	Pelanggaran hak atas informasi
Digital Circumvention	Cross-posting menghindari moderasi platform Barat	<i>Resilience of propaganda reach</i>	<i>Abuse of technological affordances</i>
<i>International Narrative Engineering</i>	Mengaburkan agresi sebagai “tindakan sah”	Penerimaan masyarakat global	<i>Violation of state epistemic duty</i>

Tabel 4.2. Analisis Komparatif Mekanisme *Lawfare* Rusia dan Kerusakan Epistemik

4.3 Respons Ukraina: Pertahanan Informasi dan Dilema Demokratis

Menghadapi serangan *lawfare* yang sistematis, Ukraina merespons dengan strategi pertahanan yang adaptif, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan institusi demokrasi.

4.3.1 Inovasi Institusional dan Konsolidasi Narasi

Ukraina menerapkan pendekatan defensif melalui konsolidasi ruang informasi nasional dan inovasi institusional. Salah satu langkah utamanya adalah inisiatif United News Telethon, yang menyatukan berbagai saluran televisi utama untuk menyiarkan satu narasi berita terpadu guna mencegah fragmentasi informasi di masa krisis (NATO

StratCom, 2024). Selain itu, Ukraina mendirikan Center for Countering Disinformation (CCD) yang bekerja sama erat dengan sektor teknologi global dan komunitas *OSINT* untuk memverifikasi fakta secara *real-time* (CPD Ukraine, 2023). Strategi ini terbukti efektif secara taktis untuk menjaga moral publik di tengah gempuran propaganda Rusia. Pada tingkat internasional, respons ini didukung oleh tindakan tegas dari platform teknologi global; misalnya, Meta pada September 2024 melarang outlet media negara Rusia dari seluruh aplikasinya dengan alasan "aktivitas campur tangan asing" yang memberikan informasi palsu (PBS, 2024).

4.3.2 Dilema Etis dan Keseimbangan Demokrasi

Meskipun efektif, sentralisasi informasi ini membawa risiko jangka panjang bagi demokrasi. Tantangan etis utama bagi Ukraina adalah memastikan bahwa langkah-langkah darurat, seperti penyatuan siaran berita, tidak menjadi permanen atau digunakan untuk membungkam kritik domestik yang sah pasca-konflik. Respons yang etis harus tetap berpegang pada prinsip proporsionalitas, di mana pembatasan informasi hanya dilakukan sejauh diperlukan untuk keamanan nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar kebebasan pers yang membedakan Ukraina dari agresornya. Sebagaimana dicatat dalam analisis NATO StratCom (2024), mempertahankan keseimbangan antara keamanan operasional dan transparansi demokratis adalah ujian utama bagi ketahanan institusi Ukraina dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Invasi Rusia ke Ukraina telah mempertegas bahwa disinformasi bukan lagi sekadar aktivitas pinggiran dalam konflik, melainkan instrumen *lawfare* strategis yang dirancang untuk memanipulasi dimensi legal, psikologis, dan epistemik perang secara domestik. Secara internal, Rusia membangun realitas alternatif melalui sinergi antara propaganda negara, kriminalisasi kebenaran lewat Pasal 207.3 KUHP, dan manipulasi digital di platform seperti Telegram. Strategi ini berhasil menciptakan kerusakan

epistemik yang masif dengan menutup akses warga terhadap kebenaran faktual dan menggantikannya dengan narasi negara yang sudah di fabrikasi.

Dalam ranah internasional, *lawfare* Rusia beroperasi melalui fabrikasi legalitas semu untuk memberikan justifikasi moral bagi agresi ilegal. Penggunaan narasi seperti "denazifikasi", "perlindungan genosida", dan klaim "pertahanan diri preventif" merupakan bentuk manipulasi bahasa hukum untuk melumpuhkan respons moral komunitas global. Strategi ini menunjukkan bagaimana Rusia secara aktif mempersenjatai ambiguitas hukum dan sejarah untuk mengaburkan status agresi mereka sekaligus mengeksploitasi kerentanan kognitif publik internasional melalui operasi disinformasi yang terstruktur.

Tanggung jawab moral atas kerusakan ini tersebar dalam ekosistem yang melibatkan aktor negara sebagai arsitek kebijakan serta aktor media dan propagandis sebagai pelaksana sukarela. Meskipun komunitas global dan platform teknologi telah merespons dengan sanksi hukum internasional dan moderasi konten yang ketat, tantangan terbesar ke depan adalah mempertahankan integritas moral dan demokratis di tengah upaya sistematis Rusia untuk menghancurkannya. Penelitian ini menegaskan bahwa menghadapi *lawfare* modern menuntut lebih dari sekadar respons teknis, melainkan diperlukan komitmen etis yang kuat untuk menjaga kebenaran sebagai pilar utama kedaulatan bangsa.

Terakhir, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat dilakukan pengujian kembali sehingga mendapat hasil yang final. Pertama, akses terhadap data primer dari dalam wilayah Rusia sangat terbatas akibat sensor ketat dan risiko keamanan sehingga analisis sangat bergantung pada sumber sekunder, arsip digital, dan laporan pihak ketiga. Kedua, terdapat potensi bias dalam sumber-sumber Barat atau Ukraina yang digunakan sebagai pembanding meskipun upaya triangulasi telah dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai organisasi internasional yang kredibel. Ketiga,

sifat dinamis dari perang informasi berarti bahwa taktik dan narasi yang dianalisis dapat berubah dengan cepat seiring perkembangan situasi di medan perang. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini harus dipahami sebagai analisis kualitatif terhadap pola perilaku strategis dalam periode waktu tertentu, bukan sebagai kesimpulan final yang statis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bjola, C. (2018). The Ethics of Countering Digital Propaganda. *Ethics & International Affairs*, 32(3), 305–315. <https://doi.org/10.1017/S0892679418000436>
- Center for European Policy Analysis (CEPA). (2023). *Behind the lines: Russia's brutal war on Ukraine's journalists*. <https://cepa.org/article/behind-the-lines-russias-brutal-war-on-ukraines-journalists/>
- Center for Countering Disinformation (CPD) Ukraine. (2023). *Handbook: Weapons of information warfare*. <https://cpd.gov.ua/en/manuals/handbook-weapons-of-information-warfare/>
- Espaliú Berdud, C. (2023). Use of disinformation as a weapon in contemporary international relations: accountability for Russian actions against states and international organizations. *Profesional De La Informacion*. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.jul.02>
- Federal Law No. 32-FZ. (2022). *On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Articles 31 and 151 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation*. Russian Federation.
- Fisher, B. (2022). Russia's invasion of ukraine and the doctrine of malign legal operations. *Access to Justice in Eastern Europe*, 5(4-2), 25–51. <https://doi.org/10.33327/ajee-18-5.4-a000456>

- Floridi, L. (2013). *The ethics of information*. Oxford University Press.
- Giles, K. (2023). *Russian cyber and information warfare in practice: Lessons observed from the war on Ukraine*. Chatham House.
<https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2023-12/2023-12-14-russian-cyber-info-warfare-giles.pdf>
- Johansson-Nogués, E., & Şimanschi, E. (2023). Fabricating a war? Russian (dis)information on Ukraine. *International Affairs*, 99(5), 2015–2036.
<https://doi.org/10.1093/ia/iiad179>
- Kittrie, O. F. (2016). *Lawfare: Law as a weapon of war*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190263577.001.0001>
- NATO StratCom COE. (2015). *Analysis of Russia's Information Campaign Against Ukraine*. NATO Strategic Communications Centre of Excellence.
- NATO StratCom COE. (2022). *Virtual Manipulation Brief: Russia's Struggle to Circumvent Sanctions*. NATO Strategic Communications Centre of Excellence.
- NATO StratCom COE. (2024). *War on All Fronts: How the Kremlin's Media Ecosystem Broadcasts the War in Ukraine*. NATO Strategic Communications Centre of Excellence.
- NATO StratCom COE. (2025). *The Use of Russian Proxy Actors in the Media Environment in Ukraine*. NATO Strategic Communications Centre of Excellence.
- PBS. (2024). *Russian state media outlets banned from Meta's apps over 'foreign interference activity'*. PBS News Hour. <https://www.pbs.org/newshour/world/russian-state-media-outlets-banned-from-metas-apps-over-foreign-interference-activity>
- Reporters Without Borders (RSF). (2025). *Three years of Russian full-scale invasion of Ukraine: nearly 150 journalists attacked*. Reporters Without Borders. <https://rsf.org/en/three-years-russian-full-scale-invasion-ukraine-nearly-150-journalists-attacked>
- Robin, M. (2024). Are propagandists combatants? Analysing the ethical status of



Jurnal Strategi Pertahanan Darat,
Volume 11, Nomor 2, 2025

E-ISSN 2746-8496

propagandists in warfare. *Review of International Studies*. 2024;50(6):1046-1065.
doi:10.1017/S0260210524000044

Thomson Reuters Foundation & Committee to Protect Journalists (CPJ). (2022).
Understanding the laws relating to “fake news” in Russia. <https://cpj.org/wp-content/uploads/2022/07/Guide-to-Understanding-the-Laws-Relating-to-Fake-News-in-Russia.pdf>